

Peran Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Implementasi Kebijakan

Pendidikan Penguatan Karakter (PPK)

Oleh : Meutia Pelangi hapsari

***Abstract.** Education is essentially a human conscious effort to develop the personality both inside out of school and last a lifetime. Educational reform is a response to the development of global demands as attempt to adapt an educational system which is capable of developing human resources to meet the demands of the emerging era. Seeing the condition of the problems of the nation's generation in this globalization era is quite apprehensive so many case concern education recently until becoming viral in Indonesia. Character education is a very important key in making the child's personality. In addition to home, character education also need to be applied at school and social environment. The issued raised in this study; what is the Role of the Education Office in Semarang City in the Implementatation of Characte Building Education Policy.*

The purpose and research is to know how the Role of the Education Office in Semarang City in the Implementation of Character Building Education Policy.

The method which is used in this research is qualitative method by doing data collection tevhniques such as interview, observation and documentation. The informants in this study is the leadership of the Education Office of Semarang City, employees and supervisors.

The result of this study indicate that the Role of the Education Office of Semarang City in the implementation of the Character Building Education policy has been running well. The main problem faced is about human resources and facilities.

Keywords: Public Policy, Character Education, Implementation

Abstrak. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melihat kondisi permasalahan generasi bangsa di era globalisasi ini cukup memprihatinkan, banyaknya kasus-kasus yang menyangkut dunia pendidikan akhir-akhir ini hingga menjadi sesuatu yang viral di Indonesia. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter di Kota Semarang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan melakukan teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Dinas Pendidikan Kota Semarang, pegawai dan pengawas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter sudah berjalan dengan baik. Masalah utama yang dihadapi adalah mengenai sumber daya manusia dan fasilitas.

Kata kunci: Kebijakan publik, Pendidikan Karakter, Implementasi

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.¹Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, karena bagaimanapun juga, kebudayaan tidak hanya dari naluri semata tapi dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas. dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat.

Menurut Brown (dalam Ahmadi, 2004 :74)² bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup.

Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi

“ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”.

¹ Ahmadi dan Uhbiyati. 2007. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

² Ahmadi, Abu. 2004. Psikologo Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta

Sistem pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian agar dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar di tentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu. Posisi nilai pendidikan yang hilang dari kurikulum pendidikan formal disinyalir oleh beberapa kalangan menjadi salah satu penyebab akan berkurangnya moralitas yang tercermin dari masyarakat dengan tingginya angka kriminalitas sekarang ini.

Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab siswa dan tenaga kependidikan saja melainkan dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah yang harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam dunia pendidikan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak yang lahir sejak awal kehidupannya, dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan³

Melihat kondisi permasalahan generasi bangsa di era globalisasi ini cukup memprihatinkan, banyaknya kasus-kasus yang menyangkut dunia pendidikan akhir-akhir ini

³ Dimiyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud.

hingga menjadi sesuatu yang viral di Indonesia. Fenomena ini sangatlah disayangkan oleh banyak pihak karena mereka adalah calon penerus bangsa yang diharapkan dapat membuat bangsa ini menjadi semakin baik. Keresahan inilah yang membuat Pemerintah untuk melakukan suatu tindakan perubahan untuk memperbaiki mental generasi penerus bangsa, melalui berbagai macam proses penyusunan kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, Dengan demikian, Pemerintah mengeluarkan Permendikbud No 23 tahun 2017 Tentang Hari Sekolah yang berujung menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan sebagian pemuka agama yang merasa peraturan tersebut kurang tepat dan sempit menimbulkan demo di berbagai daerah yang menimbulkan *headline* berita di beberapa stasiun televisi, tidak ingin hal tersebut menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan kemudian Presiden Republik Indonesia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) melalui berbagai pertimbangan. Pusat memberikan mandat kepada setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, salah satunya Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memberikan pelatihan kepada guru – guru di tiap sekolah tidak hanya Negeri saja tetapi sekolah swasta pun tak lupa untuk diperhatikan agar dapat melaksanakan program Pendidikan Penguatan Karakter, Pendidikan Penguatan Karakter atau PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spriritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila⁴.

Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan Generasi

⁴ <http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id> di akses pada tanggal 24 November 2017

Emas 2045, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. Selain lima nilai utama karakter, melalui PPK, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berada di bawah kewenangan Kabupaten Kota, sebelumnya hanya mengurus Sekolah Dasar saja. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004, semua tingkatan sekolah masih di dalam kewenangan Kabupaten Kota. Kewenangan tersebut berubah disaat adanya perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014, dimana kewenangan pada tingkatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa berada pada bagian urusan Daerah Provinsi meninggalkan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di Kabupaten Kota.

Di tahun 2016 sebanyak 542 sekolah (SD dan SMP) telah tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah menerapkan berbagai praktik baik pendidikan karakter sehingga diharapkan mampu menjadi contoh/teladan dan menularkan "virus kebaikan" dalam penerapan PPK di sekitarnya. Sekolah-sekolah yang dipilih juga ditentukan berdasarkan keterwakilan provinsi, kondisi geografis, maupun status sekolah negeri dan swasta. Di Kota Semarang sendiri ada sebanyak 219⁵ Sekolah Menengah Pertama dan MTS, yang terdiri dari 43 sekolah negeri dan 176 sekolah swasta dan MTS.

⁵ <http://disdik.semarangkota.go.id/v11/node/355728>

Pilot project dari kebijakan tersebut di Semarang sendiri terpilih SMPN 2 Semarang yang sudah terlebih dulu melakukan Pendidikan Penguatan Karakter atau kebanyakan orang menyebutnya lima hari sekolah, walaupun tidak banyak diketahui bahwa ada beberapa sekolah swasta yang sudah menerapkan lima hari sekolah jauh sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut. Ada sebanyak 175 sekolah swasta⁶ di Kota Semarang dan belum semuanya sudah melaksanakan kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter, menimbulkan sebuah pertanyaan apakah strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah berhasil atau perlu dilakukan perbaikan dalam kinerjanya agar menjadi patokan lebih baik lagi.

Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu munculnya suatu kebijakan mengenai pendidikan, dalam hal ini kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter dapat diketahui strategi apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Apakah sudah berjalan dan terfasilitasi dengan baik dan merata atau masih ada beberapa hal yang kurang, serta banyak menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja selama ini, apakah masyarakat dan tenaga pengajar merasa terlayani dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Strategi Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Melaksanakan Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter.

⁶ *Disdik Kota Semarang* diakses pada 3 November 2017

KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah petunjuk, aturan, rambu-rambu, signal-signal penting, prinsip-prinsip yang harus dipegang, penggarisan kewenangan, batas-batas, aturan main internal, dan berbagai hal yang memayungi pembuatan program/kegiatan, maupun aturan-aturan untuk pelaksanaan. Kebijakan public dapat pula bermakna bahwa pemerintah pembuat serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.⁷

Ada pula menurut Easton (1969) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tolak ukur keberhasilan dalam mengevaluasi permasalahan kemudian menterjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus.⁸ Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan, kebijakan hanyalah sebuah awal belum dapat dijadikan sebagai indicator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Banyaknya proses yang harus dilalui untuk dapat menjadi sebuah kebijakan, namun ketika pada tahap implementasi dan berbagai faktor dari mempengaruhi kebijakan tersebut barulah keberhasilan atau ketidak-berhasilan kebijakan itu diketahui.

⁷ Lalu Said Ruhpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2005.

⁸ Robert T. Nakamura and Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin's. Press, New York, hlm.145

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono, 2005: 89 – 104):

a. Teori George C. Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, bahwa ada empat faktor yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi *communication, resources, dispositions* dan *bureaucratic structure*.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel Isi Kebijakan Mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- 5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- 6) Apakah sumber dayanya telah memadai.

Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) Berpendapat bahwa ada 3 (tiga) kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undangundang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables effecting implementation).

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pendidikan Penguatan Karakter

Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama pendidikan nasional adalah membentuk watak yang berakhlak mulia, berilmu , kreatif, mandiri ,beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikan peserta didik menjadi generasi yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dituntut untuk mempersiapkan peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 untuk menghadapi dinamika perubahan dimasa depan, seiring pertumbuhan zaman Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang dirasa dapat memberikan perubahan kepada penerus generasi bangsa.

Pendidikan Penguatan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Memusatkan jaringan Tri Pusat Pendidikan yaitu antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang berjalan berkesinambungan, terlebih kegiatan para siswa dapat terpantau dengan baik oleh orang tua karena sekolah menjadi sentral dari pembelajarannya.

Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Kedepan diharapkan PPK agar dapat mengintegrasikan, memperdalam, memperluas dan menyelaraskan program kegiatan pendidikan karakter. Dalam konteks ini pengintegrasian yang dimaksud berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah dan di luar sekolah serta pemaduan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Perdalam dan perluasan yang dimaksud dapat berupa penambahan kegiatan yang mengacu kepada pengembangan karakter siswa secara intensif serta pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah. Dan yang terakhir adalah penyelarasan dimana berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah dan fungsi komite sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK.

B. Implementasi Pendidikan Penguatan Karakter Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang.

Pendidikan Penguatan Karakter merupakan suatu program yang dinilai sangat bagus dan dapat memberikan dampak positif dan sangat bermanfaat pada para murid dan guru, didorong dengan kerjasama antara murid dan guru agar tercipta suatu hubungan komunikasi yang relevan. Selain guru dan murid, kepala sekolah juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan Pendidikan Penguatan Karakter seperti dengan mendukung kegiatan-kegiatan dalam program ini. Diluar lingkungan sekolah, masyarakat pun dapat dilibatkan untuk mendukung program ini seperti pelibatan dalam kegiatan kerja bakti pada lingkungan sekitar

sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal para murid tersebut. Banyaknya kegiatan-kegiatan untuk menumbuh dan mengembangkan karakter para murid menjadi kunci utama agar tetap tertanam dalam pikiran mereka untuk jangka waktu yang panjang dan menjadikan mereka generasi emas tahun 2045.

Berdasarkan data dari laporan Dinas Pendidikan tahun 2017 dari total 176 sekolah di Kota Semarang jumlah SMP Negeri yang telah melaksanakan Pendidikan Karakter Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 32 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 30 sekolah. Bertambahnya tahun dapat dipastikan jika jumlah tersebut dapat mengalami kenaikan yang pasti mengingat kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pemerintah Kota Semarang sendiri mendukung penuh atas kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter dari pusat yang kemudian dijadikan pedoman, dengan adanya pedoman tersebut sekolah-sekolah akan diberi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, kemudian mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang kebijakan dan tidak lupa Pemerintah harus memonitoring dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut agar sesuai dengan harapan bersama.

masyarakat.

Seiring diberlakukannya kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter, ada berbagai macam respon dari pihak sekolah maupun orang tua murid, ada yang sangat mendukung dan ingin menerapkan tetapi ada juga beberapa sekolah yang kurang setuju. Memang kebijakan tersebut boleh dilaksanakan boleh tidak tetapi lebih baik lagi untuk diterapkan, maka dari itu pihak dari Dinas Pendidikan Kota Semarang pada setiap tahun tidak berani untuk memasang target karena hal tersebut dilakukan secara bertahap dengan melalui beberapa proses. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bagian Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa :

“ada yang responya itu sangat bagus ada yang biasa-biasa saja biasanya sekolah-sekolah yang kecil itu karena sumber dayanya tidak mendukung itu cenderung agak pasif meskipun kita kejar terus ya tapi sekolah-sekolah yang besar sekolah yang punya komitmen tinggi itu merepon”⁹

Pendidikan Penguatan Karakter sudah setahun berjalan, sudah mulai terlihat dampaknya kepada para peserta didik yang perlahan mulai menanamkan nilai-nilai berkarakter dalam kegiatan sehari-hari terutama lima nilai berkarakter. Sebuah evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah beberapa waktu yang lalu mengadakan “Gelaran Pendidikan Karakter“ yang diikuti oleh UPTD di 16 Kecamatan Kota Semarang, acara tersebut menampilkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik yang merupakan cerminan dari nilai dalam Pendidikan Karakter. Keberhasilan dalam kegiatan tersebut tidak lepas dari gencarnya Dinas Pendidikan dalam sosialisasi akan pentingnya penanaman Pendidikan Karakter sejak dini, dapat diketahui beberapa waktu lalu bangsa ini mengalami krisis mental dan karakter maka kebijakn Pendidikan Karakter merupakan sebuah angin segar yang dapat membuat keadaan menjadi pulih kembali dan melahirkan para generasi bangsa yang berkarakter.

C. Peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter

Pada sebuah kebijakan tentunya memerlukan pelaksana sebagai eksekutor yang dapat berasal dari instansi maupun lembaga pada pemerintahan. Dalam kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter, pemerintah pusat memberi mandate kepada Kepala Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan di setiap daerah di Indonesia bahwa perlunya diadakan pelatihan dan seminar-seminar untuk selanjutnya

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bagian Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang (Kamis 11 Januari 2018: 09.30)

diteruskan kepada sekolah-sekolah yang akan menerapkan Pendidikan Penguatan Karakter di lingkungan sekolahnya. Jika pihak sekolah menyetujui dan akan menerapkan, tidak dapat serta merta untuk menerapkan kebijakan tersebut karena terlebih dahulu harus mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung penerapan kebijakan tersebut.

Peran Dinas Pendidikan dalam Pendidikan Penguatan Karakter sangatlah penting karena mempunyai wewenang dan sebagai sarana untuk bertanya jawab mengenai kebijakan tersebut, selain itu Pendidikan Karakter merupakan fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan, mengapa demikian? Karena Sumber Daya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung kebijakan ini. Sumber Daya yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah terlibatnya semua elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, murid dan komite sekolah kemudian dari elemen keluarga juga dapat berperan aktif untuk mendorong dan mendukung kegiatan yang nantinya akan diterima oleh peserta didik dan yang terakhir adalah lingkungan di sekitar sekolah, yaitu masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam Pendidikan Penguatan Karakter seperti contoh sekolah mengadakan kegiatan kerja bakti dan gotong royong di sekitar lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat para murid dapat mengenal lingkungan di sekitar mereka dan cenderung peduli terhadap sesama.

Sebelum kebijakan tersebut di implementasikan kepada para peserta didik tentu saja Dinas Pendidikan ber peran terlebih dahulu memberikan arahan kepada para guru mengenai Pendidikan Karakter dengan berbagai macam kegiatan sebagai bentuk sosialisasi sehingga pada nantinya dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memberikan arahan-arahan yang diperlukan agar target dalam kebijakan ini dapat memahami konsep dan pedoman mengenai Pendidikan Penguatan Karakter. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mengundang perwakilan dari pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung di gedung pertemuan atau bisa menggunakan sarana aula pihak sekolah yang memadai. kegiatan tersebut memberikan dasar pengertian akan pentingnya nasionalisme dan karakter bangsa bagi generasi muda. Diharapkan setelah mengikuti beberapa rangkaian sosialisasi perwakilan sekolah dapat mendapatkan manfaat dan dapat melaksanakan kebijakan Pendidikan Karakter secara mandiri dalam proses bertahap.

2. Kegiatan Outbond

Bentuk pengenalan suatu kebijakan tidak harus melulu formal dan berada di dalam gedung saja namun dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bersama seperti outbond yang diikuti oleh peserta sosialisasi. *Outbond* merupakan pembiasaan dari nilai utama Pendidikan Karakter yakni Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong royong dan integritas. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada para peserta, salah satu yang utama adalah mengajarkan kerjasama dan gotong royong yang sekarang ini cenderung tidak banyak dilakukan oleh peserta didik pada lingkungannya. Guru merupakan digugu dan ditiru, jika para guru dapat mengajarkan kepada mereka kegiatan yang berpilar kepada nilai utama Pendidikan Karakter maka seiring berjalannya waktu para peserta didik dapat melakukan hal yang sama. Dibawah ini merupakan foto kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada perwakilan sekolah

Daftar Pustaka

Buku :

- Ahmadi dan Uhbiyati. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud.
- Ahmadi, Abu. 2004. *Psikologo Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Widjaja. Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lalu Said Ruhpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2005
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*, Alfabeta cv, 2006
- Robert T. Nakamura and Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin's. Press, New York, hlm.145
- Joko Widodo, *Analisis kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 97
- Budi Winarno, *Teori dan proses kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm 126
- Dr. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2014, hlm. 126
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta 2005, hlm. 246
- Rifai. Muhammad. 2011. *Politik Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUDNI, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, NPSK petunjuk teknis, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, Jakarta, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm 12-13
- Buku dan pedoman gerakan PPK

